

ABSTRAK

Dalam hal pengaturan Kekayaan Intelektual Internasional telah diselenggarakan berbagai macam perjanjian serta perundingan internasional, yang kemudian diterapkan dalam pengaturan nasional setiap negara anggotanya. Dalam hal penerapan perjanjian internasional khususnya dalam *TRIPs Agreement* timbul berbagai macam masalah bagi negara anggotanya, terutama dalam hal pembatasan terhadap invensi yang dapat dipatenkan. Hal tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antar negara peserta. Disuatu sisi negara membutuhkan ketentuan yang sangat mengikat, sedangkan disisi lain negara berkembang dan keterbelakang membutuhkan alih teknologi untuk pengembangan negaranya.

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan suatu studi normatif atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam rezim Paten dalam penyelenggaraan lalu lintas perdagangan global. Selain masalah perbedaan dalam hal pembatasan terhadap invensi yang dapat dipatenkan, hal yang menarik dalam pembahasan penelitian ini adalah mengenai dampak yang diakibatkan oleh perbedaan pembatasan invensi, dalam kaitannya dengan importasi produk ke dalam Indonesia. Sehingga membutuhkan beberapa sumber hukum, diantaranya adalah perjanjian-perjanjian perdagangan dunia termasuk (*World Trade Organitatin*) WTO

Oleh karena itu, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai ketentuan dasar mengenai regulasi paten di Indonesia maupun peraturan lainnya yang dapat melindungi Kekayaan Intelektual dianggap kurang dapat menaungi kepentingan nasional dan juga perlindungan terhadap inventor lokal. Seharusnya dalam Undang-Undang tersebut ditentukan secara jelas mengenai kepentingan Nasional sebagai suatu tujuan dan cita-cita Nasional, dan juga dapat menaungi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Selain itu dalam hal importasi terhadap paten pemerintah dalam hal ini hanya akan bertindak untuk pencegahan dan/atau pembatalan, yang dikarenakan adanya upaya hukum oleh inventor lokal apabila terjadi sengketa terhadap produk hasil invensi.

Kata kunci: Invensi, Hak Paten. Komersialisasi

ABSTRACT

In terms of International Intellectual Property rights has organized a wide range of international treaties and negotiations , which are then applied in the national regulation of each country member. In the case of application of international agreements , especially the TRIPS Agreement arise various problems for the member countries , especially in the case of restrictions on the invention that can be patented . It arises because of the difference in interest between the participating countries . On one side of the country requires a very binding provisions , while on the other hand developing countries and poors requires a transfer of technology to developing countries.

Research in the preparation of this thesis is a normative of Intellectual Property particular in patent in the implementation of global trade traffic . Besides the issue of differences in terms of restriction of the invention can be patented , the interesting thing in this study is the discussion about the impact caused by the difference in the restrictions invention , in relation to the importation of products into Indonesia . Thus requiring multiple sources of law , including trade agreements , including the world (World Trade Organitatin) WTO

Therefore , Law No. 14 of 2001 regarding Patents as basic provisions regarding patent regulations in Indonesia and regulations that can protect intellectual property is considered less able to overshadow national interests and the protection of local inventor . Supposedly in the Act clearly defined the national interest as a destination and national ideals , and also can overshadow and welfare of Indonesian society . Moreover in the case of importation of the patents in this case the government will only act for the prevention and / or cancellation , which due to legal action by local inventors in the event of a dispute against the products of the invention .

Keywords : Invention, Patents, Commercialization